

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung bisa dikatakan gagal, karena berdasarkan hasil temuan peneliti, advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung untuk tahun 2020 sedang dalam proses, WALHI Jawa Barat, DPKLTS dan KMBB (Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat) saat ini sedang melobby pemerintah Kota Bandung melalui rapat bersama DPRD Kota Bandung untuk melakukan perubahan pengelolaan RTH publik dan privat, perubahan pengelolaan yang dimaksud adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pada RTH publik dan privat di Kota Bandung. Hal tersebut merupakan langkah ke 4 advokasi menurut teori John Hopkins University, aksi yang dilakukan harus berkala agar pemerintah Kota Bandung terkena efek tekanan yang diberikan WALHI, DPKLTS serta KMBB (koalisi masyarakat Bandung bermartabat). Kondisi RTH di Kota Bandung saat ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang masyarakat pikirkan, banyak kendala dan permasalahan yang sangat kompleks mengenai RTH di Kota Bandung, diantaranya adalah fungsi RTH yang kurang maksimal, data RTH yang kurang di perbaharui, kualitas RTH publik yang masih kurang maksimal, kebijakan yang saling tumpang tindih kuantitas RTH yang tidak merata serta pelanggaran pengembang terhadap kewajiban untuk membangun RTH privat. Banyak nya permasalahan RTH di Kota Bandung, memberi sinyal bahwa kegiatan advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung harus tetap dilanjutkan karena RTH merupakan komponen penting untuk di perjuangkan karena memberikan dampak dan manfaat yang besar, apalagi saat

ini pembangunan yang masif seringkali di lakukan tetapi tidak dibarengi oleh pembangunan RTH yang signifikan. Pada langkah ke 3 teori advokasi John Hopkins University , proses mobilisasi menjadi titik kegagalan yang lain nya , karena WALHI,DPKLTS dan KMBB tidak melakukan pembentukan koalisi secara vertikal, yaitu melibatkan seluruh masyarakat Kota Bandung untuk berpartisipasi agar massa semakin banyak , kapabilitas koalisi semakin meningkat serta akan memberi tekanan yang cukup besar terhadap pemerintah Kota Bandung, selain itu langkah ke 2 dalam teori advokasi John Hopkins University khususnya dalam penyediaan anggaran secara garis besar merupakan titik kegagalan kegiatan advokasi karena anggaran sudah cukup tersedia tetapi anggaran tersebut masih kurang untuk melakukan kegiatan advokasi RTH di Kota Bandung

Dilihat dari komponen pendukung kegiatan advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung, proses advokasi yang telah dilakukan oleh WALHI, DPKLTS , KMBB dan masyarakat sudah cukup memuaskan tetapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti Sumber Daya Manusia yang harus memadai, penyediaan anggaran yang mencukupi, serta partisipasi masyarakat yang diharapkan lebih aktif karena berdasarkan temuan penelitian , partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi dalam kegiatan advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung, seperti mahasiswa dan tenaga pengajar yang meneliti mengenai RTH , sangat membantu untuk pengumpulan data . Pada tahap analisis , analisis mengenai RTH di Kota Bandung masih kurang mendalam sehingga mempengaruhi pendataan dan akses informasi yang saat ini masih kurang lengkap

6 tahap advokasi menurut teori John Hopkins University telah dilakukan dengan cukup baik oleh para kelompok yang melakukan kegiatan advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung (WALHI , DPKLTS, KOJO) , hanya saja perlu menunggu waktu yang cukup untuk merealisasikan tujuan akhir dari kegiatan advokasi kebijakan RTH yaitu perubahan dan peningkatan kualitas serta kuantitas RTH publik / privat di Kota Bandung. Kelompok yang melakukan kegiatan advokasi terutama untuk WALHI dan DPKLTS sebagai informan utama dalam penelitian ini melakukan tahap advokasi cukup baik dapat dibuktikan dari hasil temuan yang dilakukan peneliti diantaranya :

Analisis

Pada tahap ini WALHI dan DPKLTS cukup mempunyai informasi mengenai RTH di Kota Bandung, serta memahami permasalahan RTH di Kota Bandung, namun kekurangannya adalah informasi yang dimiliki WALHI dan DPKLTS kurang mendalam dan komprehensif karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan komprehensif, karena kegiatan advokasi memerlukan informasi / data yang banyak serta mendalam.

Strategi

Pada tahap ini WALHI dan DPKLTS dapat dikatakan sangat baik karena mempunyai tujuan yang terstruktur, WALHI dan DPKLTS memiliki strategi jangka panjang maupun pendek , untuk menjalankan strategi tersebut WALHI dan DPKLTS menyesuaikan dengan anggaran , sumber daya manusia yang dimiliki, semua dilakukan dengan perhitungan yang akurat melalui proses penyusunan

strategi sesuai dengan SMART (specific, measurable appropriate realistic , timebound), serta WALHI dan DPKLTS dapat memaksimalkan anggaran dan SDM yang dimiliki dengan cukup baik.

Mobilisasi

WALHI dan DPKLTS melakukan koordinasi dengan cukup baik, koordinasi kelompok berjalan secara horizontal dan vertical, , baik koordinasi kelompok internal atau koordinasi kelompok eksternal atau koordinasi bersama KMBB (koalisi masyarakat bandung bermartabat) dan seluruh element masyarakat di himbau untuk berpartisipasi, tetapi mayoritas pembentukan koalisi dilakukan secara horizontal , sedangkan secara vertical masih minim, WALHI dan DPKLTS juga memiliki divisi dan struktur yang jelas , mempunyai *job desk* di setiap masing masing divisi, dengan adanya koordinasi yang cukup baik proses penyesuaian strategi juga dapat berjalan dan yang terakhir adalah publikasi rencana aksi melalui media sosial yang dikemas dengan menarik.

Aksi

Pada tahap ini WALHI dan DPKLTS melakukan diskusi bersama melalui rapat DPRD Kota Bandung , perwakilan dari WALHI adalah pak Meiki selaku direktur utama WALHI periode 2019 sd 2023, aksi tersebut dapat dikatakan cukup sukses karena WALHI dapat mempengaruhi melalui pendapat tentang buruknya kualitas , minimnya peningkatan kuantitas RTH dan mendesak pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pembenahan RTH secara kualitas dan kuantitas serta mendesak pemerintah Kota Bandung agar menelaraskan kebijakan yang mengatur tentang RTH agar tidak saling tumpang tindih.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan WALHI dan DPKLTS secara bertahap keduanya melakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 bulan sekali dan rapat tahunan yang diadakan di penghujung tahun, tidak hanya evaluasi saja tetapi WALHI dan DPKLTS melakukan perbandingan hasil akhir dengan kegiatan advokasi kebijakan RTH sebelumnya, yang dimana tujuan dari perbandingan hasil adalah untuk membenahi faktor yang kurang maksimal selama proses advokasi kebijakan RTH yang sedang dijalankan, serta menjadi acuan untuk melakukan kembali kegiatan advokasi kebijakan RTH di masa mendatang.

Keberlanjutan

Tahap terakhir WALHI dan DPKLTS akan tetap melakukan kegiatan advokasi kebijakan RTH, karena isu RTH yang semakin kompleks, pada tahapan ini WALHI dan DPKLTS telah melakukan gambaran mengenai faktor yang menjadi kendala dan peluang untuk melakukan kembali kegiatan advokasi kebijakan RTH.

WALHI dan DPKLTS mempunyai tolak ukur yang hampir sama dalam setiap 6 langkah advokasi menurut teori John Hopkins University, kedua LSM tersebut meletakkan aksi sebagai indikator untuk merealistiskan kegiatan advokasi, namun DPKLTS tidak hanya menempatkan aksi, namun menempatkan beberapa langkah seperti strategi (penyediaan anggaran), mobilisasi (pembentukan koalisi yang masif), pengemasan isu dan publikasi rencana aksi dilakukan secara kreatif dalam bentuk apapun), serta aksi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya

dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah Kota Bandung sebagai oposisi dalam kegiatan advokasi perda no 7 tahun 2011 ini

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian , peneliti memberikan rekomendasi terhadap kelompok dan masyarakat yang melakukan kegiatan advokasi kebijakan RTH , serta prosedur untuk melakukan kegiatan advokasi kebijakan RTH di masa mendatang, bentuk rekomendasinya sebagai berikut :

1. Kekuatan utama dari advokasi kebijakan khususnya advokasi kebijakan RTH, terutama terletak pada analisa data dan informasi, data dan informasi sebagai dasar dari proses kegiatan advokasi, maka dari itu data dan informasi harus diperkuat , serta analisa dari data dan informasi harus dilakukan secara mendalam , alasan nya dilakukan analisa mendalam dapat menemukan konsekuensi hukum/ kebijakannya (UU, perda), lalu menghindari dari kesalahpahaman hukum yang dapat berakibat fatal , data dan informasi bisa saja sama dari berbagai sumber tetapi analisis harus berbeda untuk menyimpulkan nya analisa data dan informasi menjadi bagian yang sangat vital sebab dasar untuk melakukan advokasi kebijakan terletak pada analisis data dan informasi
2. Rekomendasi yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengumpulkan jaringan yang lebih luas, karena selain analisis data informasi, mengumpulkan jaringan juga adalah hal yang diprioritaskan untuk melakukan aksi nyata, lakukan pengumpulan jaringan secara horizontal dan vertical, agar bisa menambah jaringan secara lebih luas dan banyak.

3. Rekomendasi yang ke tiga adalah lebih mengupayakan publikasi terhadap media , khususnya untuk media lokal terlebih dahulu, karena peran media yang begitu besar terhadap publikasi informasi, DPKLTS dan WALHI sebaiknya mengupayakan secara lebih, untuk publikasi dan informasi, dalam artian dapat memonopoli media lokal terlebih dahulu.
4. Rekomendasi yang keempat yaitu pengemasan isu harus bisa lebih baik lagi serta kreatif , pengemasan isu seharusnya bisa di buat dalam bentuk apapun yang dapat menjadi perhatian , kedepan nya pengemasan isu akan dibuat dalam bentuk video yang menarik berupa sajian data informasi mengenai RTH di Kota Bandung , yang pada akhirnya masyarakat mengetahui DPKLTS dan WALHI itu apa, permasalahan apa saja yang terjadi di Kota Bandung khususnya RTH, lalu mengapa isu tersebut diangkat, secara tidak langsung bentuk pengemasan isu melalui desain grafis atau video ini dapat mengundang reaksi masyarakat dan mengundang partisipasi masyarakat perlu di evaluasi kembali terkait pengemasan isu dalam media atau bentuk yang lebih unik.
5. Rekomendasi yang kelima adalah WALHI dan DPKLTS harus dapat merangkul masyarakat yang memiliki minat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan advokasi RTH kebijakan, karena semakin banyak massa maka kegiatan advokasi akan semakin mempunyai *power* , bagaimanapun caranya masyarakat harus ikut berpartisipasi , contohnya masyarakat yang menjadi informan peneliti memiliki kepedulian terhadap kondisi RTH di Kota Bandung

6. Rekomendasi yang keenam adalah WALHI dan DPKLTS sebisa mungkin untuk memberantas para pengembang yang melanggar aturan tidak menyisakan lahan sebesar 10% untuk RTH privat , karena saat ini pembangunan masif terus dilakukan di Kota Bandung sedangkan peningkatan RTH , khususnya RTH privat tidak signifikan seperti peningkatan pembangunan, kasus tersebut dapat menjadi isu yang menarik untuk melakukan kembali advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung

Dari setiap tahap proses kegiatan advokasi ada beberapa rekomendasi dari peneliti atau penulis yang ditujukan kepada para aktor advokasi kebijakan RTH Kota Bandung melalui penulisan skripsi ini, diantaranya adalah

Analisis

Dalam tahap ini , aktor utama dari kegiatan advokasi kebijakan RTH Kota Bandung perlu memahami lebih dalam lagi isu RTH yang ada di Kota Bandung, data yang dimiliki memang cukup dikatakan lengkap tetapi perlu adanya data yang membuat data yang dimiliki oleh WALHI, DPKLTS dan KOJO lebih lengkap, contohnya seperti data sumur resapan air di Kota Bandung, data pengembang yang melanggar untuk penyediaan RTH privat, beserta data yang memuat sifat tanah yang cocok untuk di jadikan RTH di Kota Bandung

Strategi

Tahap strategi sudah cukup baik , baik WALHI dan DPKLTS memiliki rencana strategi jangka panjang dan jangka pendek , tetapi anggaran yang dimiliki oleh WALHI dan DPKLTS masih terkendala, oleh sebab itu alangkah baiknya jika *campaign* melalui media sosial lebih di fokuskan dan juga kemas isu menjadi lebih

menarik agar dapat mengundang donatur sehingga kendala dalam penyediaan anggaran dapat teratasi

Mobilisasi

Pembentukan koalisi dan penyesuaian strategi lebih di perbaiki lagi mengingat dinamisme situasi dan kondisi mengenai RTH dapat berubah secara cepat atau lambat. Pada pembentukan koalisi DPKLTS dan WALHI sebaiknya menyeimbangkan proses pembentukan koalisi antara vertical dan horizontal, karena isu RTH sangat penting untuk diangkat dan di perjuangkan oleh karena itu membutuhkan massa yang banyak baik secara vertical dan horizontal , publikasi rencana aksi juga harus dikemas secara lebih menarik agar mendapat simpatisan secara online atau offline , terlebih media sosial untuk saat ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan *campaign* dengan lebih mudah.

Aksi

Apa yang dilakukan WALHI dan DPKLTS dalam memperjuangkan keberadaan RTH sudah cukup baik, tetapi akan lebih lengkap jika DPKLTS dan WALHI dapat menggebrak isu RTH menjadi lebih *viral* dan dapat dikenal luas oleh masyarakat , entah itu melewati media sosial atau aksi secara langsung, dengan demikian agar proses kegiatan advokasi kebijakan RTH Kota Bandung mencapai tujuannya yaitu perubahan secara kualitas dan kuantitas, dengan *viral* nya aksi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI dapat lebih memberi tekanan kepada pemerintah Kota Bandung dan memberikan peluang untuk mencapai tujuan akhir kegiatan advokasi, dan berani untuk melakukan aksi yang berskala setiap tahun nya

seperti aksi penanaman pohon di wilayah yang dinilai perlu diadanya aksi tersebut.

Evaluasi

Pada tahap ini apa yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI dapat di tingkatkan lagi, evaluasi sudah dilakukan secara menyeluruh tetapi untuk evaluasi setiap komponen yang dirasa kurang maksimal saat menjalankan proses kegiatan advokasi kebijakan RTH Kota Bandung perlu lebih *detail* lagi karena evaluasi akan menentukan apakah proses kegiatan advokasi akan dilanjutkan atau tidak

Keberlanjutan

Untuk DPKLTS ,WALHI, KOJO , KMBB (koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat) dan masyarakat yang telah berpartisipasi secara langsung dan tidak langsung terhadap proses kegiatan advokasi kebijakan RTH Kota Bandung , tetap lanjutkan untuk memperjuangkan keberadaan RTH di Kota Bandung karena isu ini sangatlah penting untuk diangkat menjadi isu yang perlu di benahi secara serius , terlebih Kota Bandung hanya memiliki luas RTH kurang lebih sekitar 12 % , masih jauh untuk mencapai 30 % . Satu hal yang penting adalah semakin berkembang nya penduduk di Kota Bandung, semakin banyak nya polusi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bandung , perlu adanya keseimbangan yaitu dengan memadai nya keberadaan RTH karena secara fungsi RTH dapat menjadi sebagai penyerap polusi, penghasil O₂ dan penyerap air serta penyimpan cadangan air, fungsi tersebut juga berperan sebagai penyedia komponen penting terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Harapan untuk kedepan nya dari proses kegiatan advokasi kebijakan

RTH Kota Bandung adalah dapat menghasilkan perubahan terhadap RTH Kota Bandung secara kualitas dan kuantitas baik dari segi RTH publik atau privat

Daftar pustaka

Buku

- DuBois, B. and Miley, K. *Social work an empowering profession*. USA. Pearson Education Inc, 2005
- Dye, T. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Heryani, A. 2010 *Paradigma Kebijakan Publik*. Tasikmalaya: Unpad Press.
- Moleong, L.2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, U. 2010 *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Silalahi, U. 2015 *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Topatimasang, Roem dkk. 2016 *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta:INSISTSPress.
- Creswell, J. , 2019 *pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta : penerbit pelajar.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarmo. 2011. *Issu-issu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.

Jurnal

John Hopkins University Center for Communication Program

“A” Frame for advocacy. United States

Matland, R. ‘Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict

Model of Policy Implementation’, *Journal of Public Administration*

Research and Theory, 5 (1995): 2,4,8.

Teuku zulyadi, 2014 advokasi sosial *Jurnal Al-Bayan*

Sumber Internet

Anil Chandrika.2012. *Understanding Public Policy: Policy Analysis*’

[http://www.slideshare.net/nida19/ppt-on-understaing-](http://www.slideshare.net/nida19/ppt-on-understaing-policy)

[policy](http://www.slideshare.net/nida19/ppt-on-understaing-policy)(15.09.2019)Pukul 17.16

Yammie S Palao. 2013 *Stages of Policy Making*’

[http://www.slideshare.net/yhamskiey/policy-making-](http://www.slideshare.net/yhamskiey/policy-making-process)

[process](http://www.slideshare.net/yhamskiey/policy-making-process) (15.9.2019), Pukul 17:21

Gunes Tri Wahyu Medco foundation

[http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-](http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/)

[hijau/](http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/)

(27/08/2019) pukul 14.17

DPKP3 kota bandung <http://dpkp3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau>

(27/08/2019) pukul 14.18

BPS

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2019/01/04/181/proyeksi-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2012---2017.html>

(28/08/2019) pukul 22.21

Pengertian dan Definisi Publik

https://carapedia.com/pengertian_definisi_publik_info2104.html

(15.09.2019), Pukul 17:15.

<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/31905/7c3fb27e79826880800fb955784f14f6> Diakses pada 22 November 2020.

Undang undang

Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau